KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ekonomi triwulan III tumbuh 5,47 persen, Senayan ingatkan jaga rupiah
Tanggal : Rabu, 11 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ekonomi Triwulan III Tumbuh 5,47 Persen

Senayan Ingatkan Jaga Rupiah

Senayan menyambut baik pertumbuhan ekonomi 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, melampaui triwulan II (5,29 persen), triwulan III 2025 (5,04 persen). Ini menunjukkan ekonomi kita tangguh di tengah ketidakpastian global.


FOTO: FRAKSI PKS ID

Amin Ak

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Ak mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dan menyumbang 2,62 poin terhadap pertumbuhan. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) naik 6,06 persen. Industri pengolahan jadi penyumbang terbesar sebesar 1,20 poin, disusul perdagangan dan konstruksi.

Sinyal serupa datang dari manufaktur. Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia Oktober 2026 naik ke 54,0, tertinggi sejak Maret 2024, dengan pesanan ekspor baru tumbuh tercepat sejak survei dimulai 2011. Belanja Pemerintah tumbuh paling cepat, 8,95 persen, tapi lebih rendah dibanding triwulan II 15,97 persen.

Yang jadi sorotan, menurut Amin, konsumsi rumah tangga dan investasi tumbuh sedikit lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan total tetap naik karena beban impor terhadap perekonomian mengecil. Artinya, mesin pertumbuhan dalam negeri belum sepenuhnya menguat. "Pertumbuhan sehat semestinya berpijak pada daya beli dan investasi swasta, bukan hanya belanja Pemerintah," katanya, Senin (9/11/2026).

Selanjutnya, Amin menyoroti risiko dalam pertumbuhan ini. Pertama, kurs rupiah Rp 17.985 per dolar AS, BI-Rate 5,75 persen, dan cadangan devisa turun ke 146,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.631 triliun. Kedua, surplus dagang Januari-September 10,61 miliar dolar AS atau sekitar Rp 190,8 triliun. Turun dari 33,54 miliar atau sekitar Rp 603,2 triliun, akibat impor yang melesat.

Berikutnya, inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, dengan inflasi harga bergejolak mencapai 5,81 persen. Terakhir, defisit APBN hingga September 2026 mencapai Rp 319 triliun atau 1,24 persen PDB. Dengan kondisi itu, proyeksi defisit pada akhir tahun sekitar 2,8 persen perlu terus dijaga agar tetap kredibel.

Amin menambahkan, kemiskinan turun jadi 8,07 persen pada Maret 2026, tetapi rasio Gini naik ke 0,368. Manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata. "Karena itu Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi secara terkoordinasi, memperkuat ekspor manufaktur, serta memastikan belanja negara tepat sasaran," ujarnya.

Senada, anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi itu. Namun, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar berdampak pada pendapatan masyarakat, daya beli, kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

Marwan menyoroti konsumsi rumah tangga yang jadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 51,97 persen terhadap PDB. Meski tumbuh 5,04 persen, angka agregat itu belum tentu mencerminkan peningkatan daya beli semua kelompok secara merata. "Kondisi masyarakat berpendapatan rendah perlu diperhatikan, terutama saat kebutuhan pokok menyerap penghasilan," ingatnya.

Dia juga mencermati sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, sementara Gini Ratio berada di angka 0,368. Data itu menunjukkan penurunan kemiskinan masih perlu diikuti upaya yang lebih kuat untuk mengurangi ketimpangan.

Marwan mengingatkan, dalam pembangunan ekonomi, semua pihak tidak boleh hanya melihat besarnya kue ekonomi yang dihasilkan, tapi juga bagaimana hasilnya terdistribusi. Pertumbuhan yang baik wajib membuka peluang lebih luas bagi pekerja, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Soal ketenagakerjaan, Marwan mencatat jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2026 mencapai 147,99 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,75 persen. Perkembangan itu positif, tapi Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, upah riil, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Untuk itu, Marwan mendorong Pemerintah memperkuat sektor UMKM dan pertanian secara lebih serius dan terarah. Investasi juga harus menghasilkan lapangan kerja berkualitas bagi banyak orang. "Selain itu, efektivitas belanja negara perlu ditingkatkan agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat," tegasnya.

Pekan lalu, BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2026 sebesar 5,47 persen secara tahunan. Angka itu melampaui capaian triwulan III tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan, konsumsi rumah tangga masih jadi pendorong utama pertumbuhan.

Kata Edy, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dan jadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni 2,62 persen pada triwulan III-2026. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding triwulan III tahun sebelumnya 4,89 persen. Kinerjanya didorong kenaikan transaksi barang dan jasa online, mobilitas, pariwisata, dan kebijakan Pemerintah mengendalikan inflasi.

Edy menyebut, selain konsumsi rumah tangga, komponen lain yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2026 dari sisi pengeluaran adalah PMTB, yang tumbuh solid 6,06 persen secara tahunan. Capaian itu mencerminkan pertumbuhan investasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh 8,95 persen, jauh di atas pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,66 persen. Hal ini sejalan dengan naiknya realisasi belanja pegawai. "Terutama gaji dan tunjangan ASN, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG)," jelasnya. ■ PYB